

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani Km. 3.5 Paringin Selatan

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami berupaya untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian, semoga bermanfaat.

Paringin, 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KAB BALANGAN



MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Grafik	
Daftar Gambar.....	
Ringkasan Eksekutif	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Gambaran Umum SKPD.....	5
1.4.1 Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Diskominfo.....	10
2.1.1 Visi.....	11
2.1.2 Misi.....	11
2.1.3 Tujuan dan.....	12
2.1.4 Sasaran....	
2.1.5. Strategi	
2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2.1.7. Kebijakan Program Tahun 2021	
2.1.8 Perjanjian Kinerja (PK)	
2.2 Rencana Strategis Diskominfo.....	13
2.2.1 Visi.....	13
2.2.2 Misi.....	13
2.2.3 Tujuan.....	13
2.2.4 Sasaran.....	14
2.2.5 Strategi.....	16
2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
2.2.7 Kebijakan Program tahun 2020.....	18
2.2.8 Perjanjian Kinerja (PK)	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Akuntabilitas Kinerja Diskominfo.....	65
A. Capaian Kinerja.....	65
B. Analisis	Kinerja
.....	
66	
C. Realisasi Keuangan	
3.2. Akuntabilitas Kinerja Diskominfo.....	65

A.	Capaian Kinerja.....	65
B.	Analisis Kinerja	66
C.	Realisasi Keuangan	

BAB IV KESIMPULAN

4.1	Kesimpulan.....	69
	Saran.....	70



Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998* dan *UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan Informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban institusional Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD). Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sebagai unsur staf dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Balangan , dimana dalam

melaksanakan tugas urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati Balangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara teknis dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan memuat Visi dan Misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut memanfaatkan sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja program / kegiatan maupun kinerja keuangan .

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Disamping itu LKjIP juga dipergunakan sebagai bahan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kinerja SKPD dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun–tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3. TUJUAN

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya pada bidang urusan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian selama Tahun Anggaran 2022;
2. Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada bidang urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
3. Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
4. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.
5. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan , terdiri dari

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan
4. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Kelola e-Government ;
 - b. Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data;
 - c. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi.
5. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan Data Statistik;
 - b. Seksi Pengolahan Data Statistik Sektorial;
 - c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten

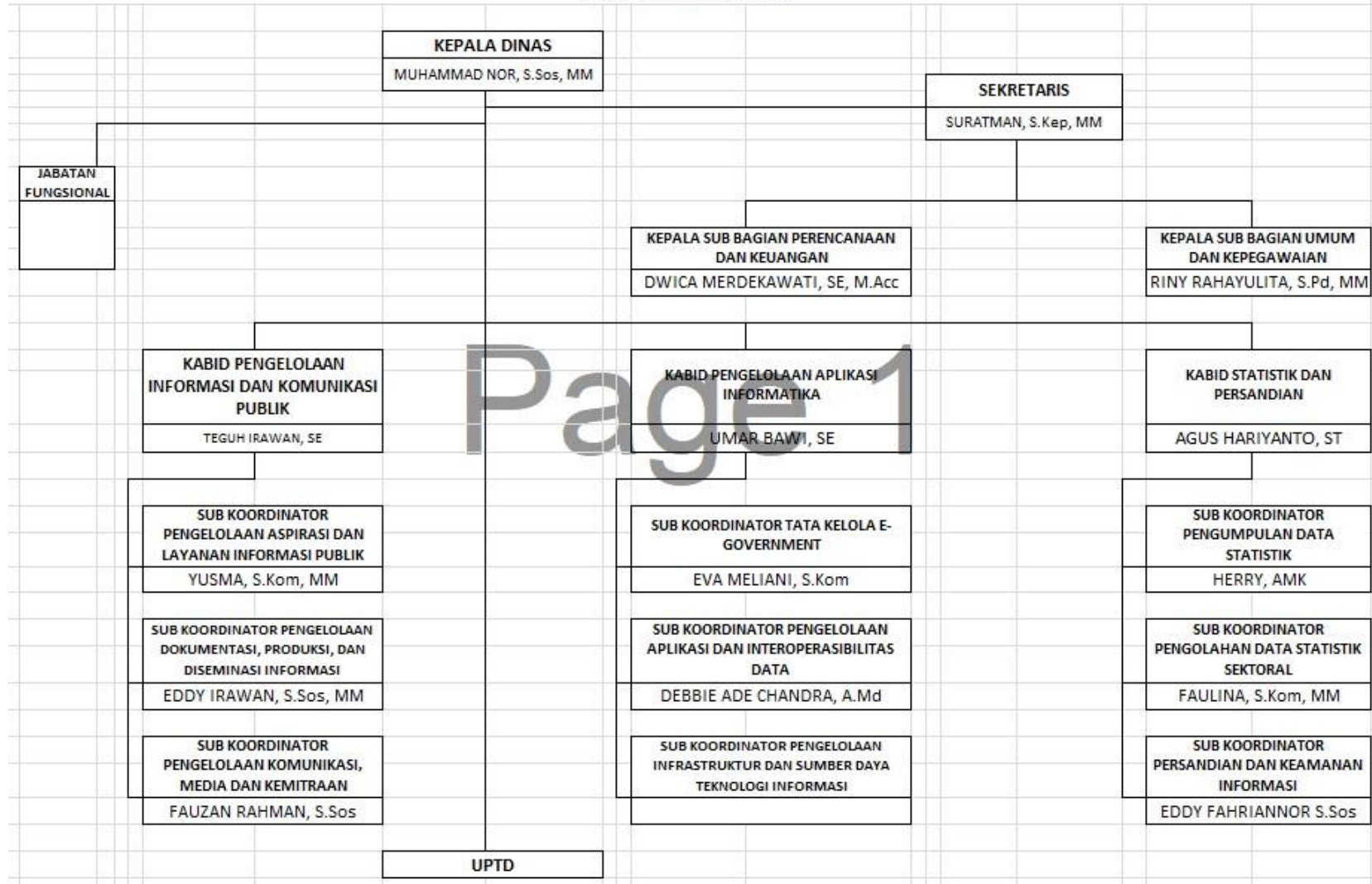
Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 76 Tahun 2017 dan sekarang digantikan oleh Peraturan Bupati Balangan Nomor: 112 Tahun 2022, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Koinfo dan Bidang Statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**



1.4.1. Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM DISKOMINFOSAN berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	2
4.	Jabatan Fungsional	7
5.	Staf	13
6.	Non PNS	
	JUMLAH	27

Tabel 1.2
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN			PRAKOM	STAF	JUMLAH
		Es. II	Es. III	Es. IV			
1.	S-3	-	-	-	-	-	-
2.	S-2	1	1	1	-	5	8
3.	S-1	-	3	-	1	11	15
4.	SM / D-3	-	-	1	1	2	4
5.	D-2 & D-1	-	-	-	-	-	-
6.	SLTA	-	-	-	-	-	-
7.	SLTP	-	-	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	4	2	2	15	27

Tabel 1.3
SDM DISKOMINFOSAN berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	57
2.	Perempuan	37
JUMLAH		94

Dukungan sarana dan prasarana Diskominfo adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor : 1 Gedung Diskominfo
2. Ruang Rapat : 1 Ruang Rapat
3. Mobil Dinas : 5 Mobil Dinas Kominfo
4. Kendaraan Dinas : 25 Unit



Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan Perbup Nomor 112 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2021-2026;
2. Renstra Diskominfo 2021-2026;
3. Renja Diskominfo Tahun 2022;
4. Penetapan Kinerja Tahun 2022.

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

2.1.1 VISI

Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 menetapkan Visi : ”
“Mewujudkan Diskominfo Sebagai Pusat Komunikasi dan Informatika Daerah yang berbasis E-Goverment”

Visi tersebut mengandung makna bahwa dengan terwujudnya Diskominfo yang berbasis E-Goverment akan dapat mendukung kecepatan layanan Masyarakat, barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. MISI

Misi yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan Layanan E-Goverment

Misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian, sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, maka pengelolaan diklat dalam program-program yang dirancang dan dilaksanakan diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional.

2.1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan sebagaimana penjabaran misi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi - Tujuan

MISI Meningkatkan Layanan E-Government
TUJUAN Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar
INDIKATOR TUJUAN Persentase Konektifitas antar wilayah

2.1.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Tujuan - Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatkan Penerapan E-Government			
Sasaran Strategis			Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Penerapan E-Government			1. Presentase penerapan E-Government pada Instansi

	Pemerintah
2. Meningkatnya Cakupan desa yang terlayani TIK	2. Persentase desa yang terlayani TIK
3. Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara online	3. Presentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan

2.1.5 STRATEGI

1. 1.2

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi

MISI III : Meningkatkan Layanan E-Government		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Penerapan E-Government	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Penerapan E-Government pada instansi Pemerintah. Meningkatnya Cakupan desa yang terlayani TIK 	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Layanan E-Government <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Layanan Aplikasi Kepemerintahan. Penyediaan Layanan Aplikasi EPublic Service. Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK. <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Manajemen

MISI III : Meningkatkan Layanan E-Government		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara online	<ul style="list-style-type: none"> Bandwidth • Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Teknologi Informasi • Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur E-government. 3. Program Kerjasama Informasi dan media Massa <ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang

digunakan untuk periode 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Penerapan E-Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	0	100	100	100	100	100
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti						
		Meningkatnya Penerapan E-Government pada instansi Pemerintah.	Persentase SKPD yang menerapkan E-Government	0	10	10	13	13	22
		Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet	Persentase desa yang terlayani TIK	0	0	10	25	50	100
		Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara Online.	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan	0	0	75	80	90	100

2.1.7 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2022

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
9. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.
10. Program Pengelolaan Aspirasi Publik
11. Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK.
12. Program Pengembangan Layanan E-Government.

111

2.1.8. PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	B 100%
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	
2.	Meningkatnya persentase SKPD yang menerapkan E-Government	Persentase SKPD yang Menerapkan E-Government	13
3.	Meningkatnya persentase desa yang terlayani TIK	Persentase Desa yang Terlayani TIK	45 %
4.	Meningkatnya persentase jumlah pengunjung perbulan	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Per Bulan	75
5.	Meningkatnya cakupan desa terpencil yang terlayani infrastruktur telekomunikasi	Cakupan Desa Terpencil yang Terlayani Infrastruktur Telekomunikasi	100

2.2. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.2.1. VISI

Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera"

2.2.2. MISI

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, dicanangkanlah 4 Misi Pembangunan Kabupaten Balangan. Dari 4 misi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian Misi Kesatu yaitu *meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.*

2.2.3. TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan sebagaimana penjabaran misi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi - Tujuan

M I S I Meningkatkan Layanan E-Government
TUJUAN Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
INDIKATOR TUJUAN <ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi - Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah

2.2.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Tujuan - Sasaran

Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa	1. Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

	2. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah
--	---

2.2.5. STRATEGI

2. 2.2

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi

MISI I : meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

2.2.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta RPJMD tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang digunakan untuk periode 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	20	40	60	80	100
		Meningkatkan Layanan Publik yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	18	18	18	23	23
		Meningkatnya Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi secara cepat dan tepat	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	80	80	85	90	95	100
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas data	Persentase Organisasi Perangkat Daerah	25	45	65	80	100	100

		dan Statistik untuk mendukung kebijakan Publik	(OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						
		Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang Komprehensif dan Implementatif	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

2.2.7 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2022

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2022 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.
5. Peningkatan pengelolaan keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistic dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.2.8. PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2022

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	40
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi Publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	80
3.	Termanfaatkan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data yang Tersedia untuk mengukur target kinerja	45

		perencanaan	
4.	Terwujudnya Aplikasi yang aman	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

A. CAPAIAN KINERJA

Indikator	2022			PREDIKAT
	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	B	B	100%	Sangat Berhasil
	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Presentase SKPD yang menerapkan E-Goverment	13%	29,27%	225%	Sangat Berhasil
Persentase desa yang terlayani TIK	10%	84%	840%	Sangat Berhasil
Persentase peningkatan	75%	80%	106,67%	Sangat

jumlah pengunjung perbulan				Berhasil
----------------------------	--	--	--	----------

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	91% sampai dengan 100%	Berhasil
III	81% sampai dengan 90%	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81%	Kurang Berhasil

B. ANALISIS KINERJA.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sangat berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 5 (Lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata - rata \geq .100% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Visi, Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan untuk masa tahun 2016-2021, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja
------------------	---

INDIKATOR	2022			Kode
	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %	Sangat Tinggi
Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis pertama yaitu “*Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja*” capaiannya sebesar 100%. Capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama ini didukung dengan adanya kinerja dari Sekretariat dimana yang bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU Esselon 3 ini adalah Sekretaris. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :

1. Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 60,21 dengan kategori B atau Baik. Jadi untuk

indikator Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja capaiannya sebesar 100 % dengan target nilai B (60) dan terealisasi dengan nilai B (60.21).

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja adalah:

Formulasi Perhitungan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kab. Balangan

Nilai sebesar 60.21 merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kominfo, yaitu penilaian terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.

Dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi (AKIP), terdapat beberapa permasalahan yang masih ada di antaranya :

- Belum terdapat data dukung terhadap monitoring pencapaian target jangka menengah dalam Renstra.
- Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan belum dimanfaatkan dalam pengarahannya kegiatan.
- Reward dan Punishment belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengukuran (pencapaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas.
- Hasil evaluasi program dan rencana aksi belum ada pemanfaatan.
- Pimpinan SKPD wajib terlibat dan paham terhadap penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator Sasaran pertama “ **Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja** ” didukung oleh capaian kinerja Eselon 3 (Sekretaris) dengan indikator kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pelaporan Kinerja”

yang capaiannya juga sebesar 100% dengan target nilai B dan terealisasi dengan nilai B.

2. **Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti**

Untuk indikator “*Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti*” capaian kinerja sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) baik dari Inspektorat maupun dari BPK semuanya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dengan adanya rekomendasi LHP ini memberikan motivasi dan juga pelajaran tentang pengelolaan keuangan daerah supaya kedepannya Dinas Kominfo Kabupaten Balangan dapat meminimalisir kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari capaian Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah:

Formula Perhitungan
Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Indikator Sasaran pertama “**Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti**” didukung oleh capaian kinerja Esselon 3 (Sekretaris) dengan indikator kinerja “Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP”.

Capaian kinerja indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP capaiannya sebesar 100% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pada Tahun 2021, Dinas Kominfo Kabupaten Balangan telah menyusun Laporan Keuangan dalam hal ini adalah Laporan Keuangan TA. 2022. Laporan Keuangan Dinas Kominfo TA. 2022 telah disusun sesuai SAP yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang jika

diuraikan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas, 5) Neraca, 6) Laporan Arus Kas, 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam Tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Esselon 3 (Sekretaris) yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja “**

**CAPAIAN KINERJA ESSELON III
SEKRETARIS TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1 Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	B	B	100%	Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan, Laporan Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Balangan memperoleh nilai 60.21 dengan predikat B
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Jumlah waktu penyediaan administrasi	100%	100%	100%	Pada Tahun 2022, Dinas KOMINFO Kabupaten Balangan telah menyusun Laporan Keuangan dalam hal ini adalah

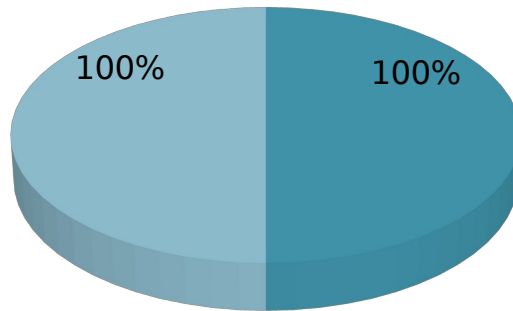
			keuangan perangkat daerah				Laporan Keuangan TA. 2022. Laporan Keuangan Dinas Kominfo TA. 2022 telah disusun sesuai SAP yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang jika diuraikan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas, 5) Neraca, 6) Laporan Arus Kas, 7) Catatan Atas Laporan Keuangan
--	--	--	---------------------------	--	--	--	---

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pertama adalah:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Kinerja Sekretaris Tahun 2022

- Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pelaporan Kinerja
- Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP



Tercapainya Capaian Kinerja dari Esselon III (Sekretaris) karena ditunjang oleh kinerja Esselon IV (kasubag Perencanaan dan Pelaporan) dengan Kegiatan :

- a. Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD
- b. Penyusunan Dokumen perencanaan

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 ESSELON IV (KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN) ESSELON IV (KASUBAG KEUANGAN)

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya Penyusunan	1 Jumlah dokumen dan Laporan	1 Dok	1 Dok	100%

	Laporan Kinerja SKPD		Akuntabilitas Kinerja SKPD yang disusun			
2	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD	1	Jumlah waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	100%

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya koordinasi yang baik dengan bidang - bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Keikutsertaan karyawan/ti penyusun laporan untuk mengikuti diklat/*workshop* terkait penyusunan Lakip SKPD, Renstra, Renja dan penyusunan laporan keuangan.

Permasalahan / Hambatan

1. Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami proses penyusunan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SKPD dan proses perencanaan anggaran

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Penambahan SDM di sub bagian perencanaan dan keuangan yang mempunyai dasar pendidikan akuntansi atau keuangan.
2. Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan perencanaan dan penyusunan laporan keuangan.

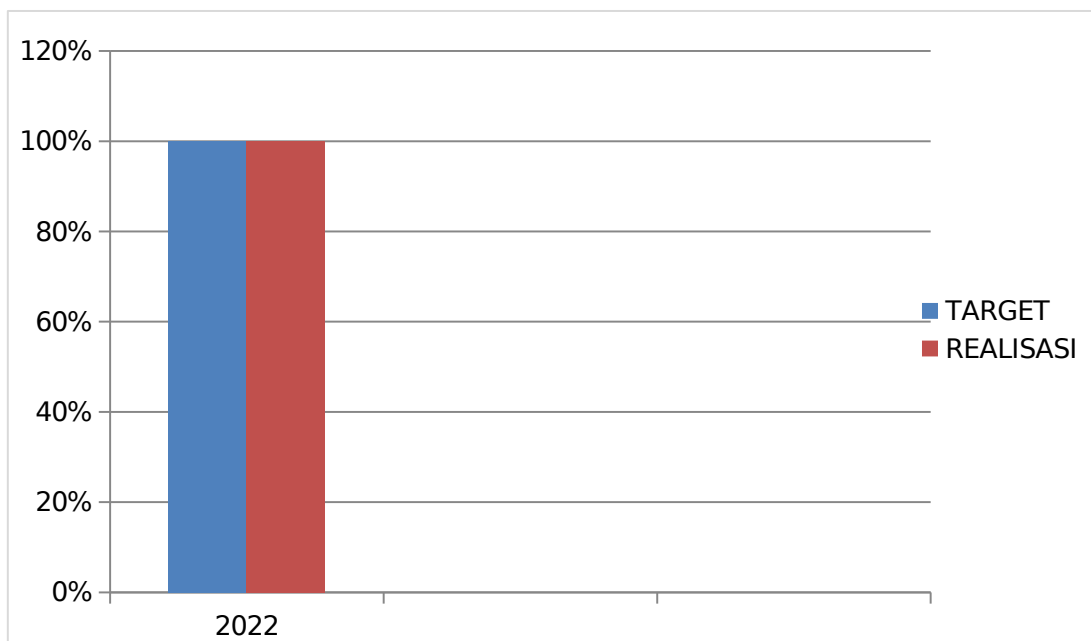
TUJUAN	Meningkatkan Penerapan E-Government
SASARAN STRATEGIS	<i>Meningkatnya Penerapan E-Government</i>

pada Instansi Pemerintah

Formula Perhitungan:
Jumlah SKPD yang memiliki akses internet yg terhubung diskominfo /Jumlah Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Balangan X 100%
$\frac{17}{30} \times 100\% = 56,67\%$

No	Indikator	2022			KODE
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Jumlah OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	6 opd	6 opd	100%	Tinggi

Grafik



Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada **sasaran Pertama** sebagai berikut :

- ❖ Jumlah OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah
 Jumlah OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah ini dihitung dari jumlah SKPD yang memiliki jaringan koneksi internet yang online dan terhubung dengan aplikasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perhitungannya adalah dari 30 SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan sudah 30 SKPD yang terhubung dengan jaringan koneksi internet yang di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Namun dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indicator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

- ❖ kenaikan capaian kinerja sebesar 56,67 % hal ini disebabkan oleh kesadaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan public yaitu diterapkan beberapa aplikasi yang diterapkan di SKPD kabupaten balangan dari 30 SKPD yang

menerapkan sampai dengan tahun 2022 ada 30 SKPD yang menerapkan E-Government.

Permasalahan/hambatan:

1. Belum diterapkannya secara maksimal Perda E-Government
2. Belum terintegrasinya Data Penerapan E-Government di SKPD
3. Kurangnya SDM E-Government yang berbasis TIK, terutama Programmer dan Admin
4. Kurangnya Program dan Aplikasi Penunjang E-Government
5. Belum tersedianya anggaran yang memadai.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Mendorong aktif Perda E-Government segera diterapkan.
2. Implementasi SOP Pembuatan Aplikasi Database, SOP Sub Domain dan Perbup Website.
3. Mengintegrasikan Data TIK SKPD Kabupaten Balangan
4. Pembuatan Program Aplikasi E-Government baik secara mandiri, dan Kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga lainnya dalam hal penerapan E-Gov
5. Menginventarisasi kembali dan update data TIK SKPD Kab. Balangan
6. Membuat perencanaan layanan e-government
7. Membuat Regulasi dan Aplikasi dalam bentuk e-gov dan e-public service.

Sasaran pertama “***Meningkatnya Penerapan E-Government pada instansi Pemerintah***” didukung program dan kegiatan :

1. Program Pengembangan Layanan E-Government

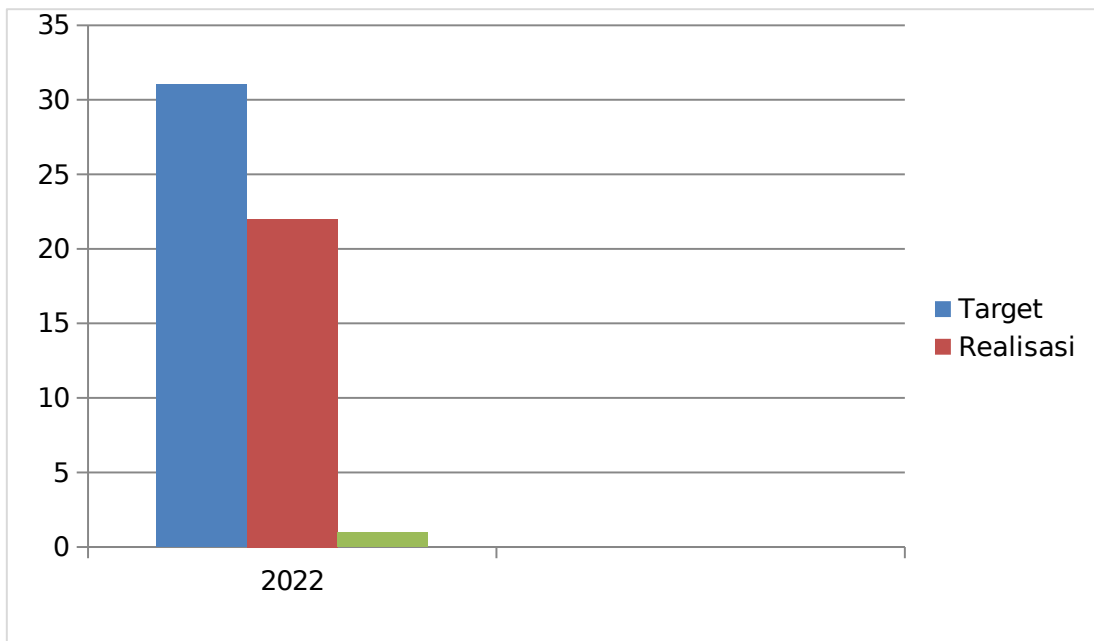
Kegiatan :

- **Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

SASARAN STRATEGIS *Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet*

No	Indikator	2021			Kode
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Cakupan Internet	31	22	148 %	Sangat Tinggi

Grafik



Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis kedua yaitu **“Meningkatnya Cakupan desa yang terlayani TIK”** capaiannya 148 % . Dari target yang ingin di capai di tahun 2022, 21 Desa Terpencil/blank spot yang terlayani TIK. Perolehan capaian persentase didapat dengan memakai definisi operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan	
Σ Desa Terpencil yang terlayani TIK	x 100%
Σ Desa Terpencil	

Sehingga realisasi yang didapat sebesar 94,27 % berdasarkan target kinerja tahun 2022 sebesar 10% didapat persentase capaian kinerja sebesar 148 %. Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja desa terpencil yang terlayani TIK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet	Persentase Desa Terpencil yang terlayani Infrastruktur Telekomunikasi	10%	94,27%	148 %



Tabel 3.3

**Perbandingan Realisasi desa yang terlayani TIK dari tahun
2018 s/d Th 2022**

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Persentase Desa Terpencil yang terlayani Infrastruktur Telekomunikasi	0%	24%	44%	84%	94.27%

Grafik

**Perbandingan Persentase Desa Terpencil yang Terlayani
Infrastruktur Telekomunikasi dari Tahun 2018-2022**



- ❖ Se jauh ini untuk mencapai target indikator Persentase Desa Terpencil yang terlayani Infrastruktur Telekomunikasi (%) ada beberapa usaha yang telah dilakukan yaitu :
 1. Pembangunan beberapa infrastruktur jaringan internet yang terus dilaksanakan seperti Jaringan Koneksi Internet desa blank spot

Yaitu 2 desa terpencil/blank spot yang terlayani TIK tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 2 desa terpencil.

2. Ditahun 2022 telah dilakukan pembangunan Jaringan koneksi internet Desa, yaitu 2 lokasi di Kecamatan Paringin Selatan yaitu : Desa Murung Abuin dan Desa Telaga Purun.
 3. Dari target 8 kecamatan, 25 desa terpencil sampai dengan tahun 2022 yang sudah tercover jaringan telekomunikasi adalah 8 kecamatan, 23 desa terpencil yang terlayani TIK.
 4. Pada tahun 2022 kominfo Kabupaten balangan juga mendapatkan 20 BTS dari bhakti yaitu Desa Ambakiang, Desa Anuing, Desa Auh, Desa Bata, Desa Binuang Santang, Desa Dayak Pitap, Desa Gunung Riut, Desa Ju'uh, Desa Mamantang, Desa Mauya, Desa Pelajau, Desa Puyun, Desa Sumber Agung, Desa Sumber Rezeki, Desa sikontan, Desa Simpang Bumbuan.
 5. Terlaksananya Pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Balangan dan penerimaan PAD dari retribusi menara.
- Pemasangan CCTV di 8 titik rawan lakalantas di Kabupaten Balangan.

FOTO-FOTO KEGIATAN

1. Desa Telaga Purun



2. Desa Murung Abuin





Upaya yang dilakukan RPJMD 2021-2026.

Untuk sisa capaian akhir RPJMD yaitu 16% atau 4 desa terpencil yang belum dilayani internet, pada tahun 2022 akan dilanjutkan dianggarkan di anggaran murni yaitu 4 Desa terpencil sehingga dapat tercapai target pada tahun 2022 yaitu 2 desa terpencil (7 %) akan tetapi karena adanya prioritas anggaran Covid 19 dan UKK imigrasi pada saat anggaran 2022 rencana 4 desa terpencil akhirnya dikurangi sehingga

pada tahun 2023 akan dianggarkan lagi 2 desa terpencil (7%) sehingga pada capaian tahun 2023 sisa 4 desa terpencil semuanya akan tercapai.

Faktor-faktor yang mendukung Keberhasilan:

- Komitmen Kepala Daerah untuk tetap melaksanakan anggaran Pembangunan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot karena merupakan salah satu indicator Visi Kepala Daerah dalam suksesnya Pembangunan Desa di Kabupaten Balangan.
- Anggaran yang teralokasikan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet.
- Tersedianya SDM yang berkualitas yang mempunyai kapasitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan dibantu oleh para Tenaga Ahli IT yang direkrut Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan/hambatan:

1. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet ini adalah waktu yang sangat mendesak, karena adanya perubahan lokasi desa yang baru ditetapkan di APBD perubahan 2022.
2. Kurangnya Minat Provider untuk membangun didaerah pedesaan atau desa terpencil karena apabila dilihat dari sisi bisnis secara komersial tidak signifikan apabila membangun infrastruktur di wilayah yang berpenduduk jarang.
3. Belum Dilakukannya survey secara menyeluruh untuk mendapatkan data riil ke area pedesaan terpencil sehingga belum dapat dipastikan daerah desa terpencil mana saja yang belum dapat diakses telekomunikasi jaringan internet.
4. kurangnya pengetahuan sebagian warga akan internet, cara kerja internet, cara memanfaatkan internet, dan cara menanggulangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh internet sehingga menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat aspek kontranya ialah warga takut akan dampak negatif internet bagi anak-anak Desa terpencil. Beberapa warga, menganggap internet tidak dibutuhkan di desa, dan sebagian

warga menganggap adanya internet mengganggu sinyal yang dikuatkan antena repeater GSM.

5. Dengan meningkatnya & bertambahnya koneksi internet yang terhubung dari Diskominfo ke desa-desa secara statistik akan meningkat kerusakan peralatan-peralatan telekomunikasi. Penyebabnya antara lain lonjakan listrik yg tidak teratur, induksi petir dimusim hujan, terpotongnya kabel disebabkan gigitan binatang dan atau disengaja oleh orang yg tidak bertanggung jawab.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Melakukan Perencanaan yang matang dan penambahan anggaran untuk membangun infrastruktur dan teknologi informatika.
2. Melakukan survey secara spesifik menggunakan peralatan tertentu dengan didukungnya peralatan seperti gadget yang dikoneksikan dengan minimal 3 operator besar cellular dengan metode drive test.
3. Melakukan Kegiatan sosialisasi pengenalan internet dan aplikasinya kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar mereka mengerti cara menggunakan internet dengan baik dan bijak, serta tidak menggunakan jaringan internet untuk hal-hal yang negatif, pemanfaatan internet kreatif dan positif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh internet dengan perlunya pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet.
4. Mengusulkan Penambahan SDM TIK khususnya tenaga survey untuk melihat apakah menara dan peralatan jaringan internet masih dapat digunakan dan tidak mengalami kerusakan.
5. Dengan menambahkan biaya untuk pemeliharaan peralatan. Mengkoordinir dengan memanfaatkan group komunikasi (WA, Telegram) berupa pengiriman info & pemecahan permasalahannya sehingga terlayani dengan cepat. Contoh group tersebut adalah membuat layanan Helpdesk antar SOPD, Kecamatan & Desa.

6. Membangun Jaringan Fiber Optik dan Menara SST untuk desa dan SKPD.

Sasaran kedua “**Meningkatnya Cakupan Desa yang terlayani TIK**” didukung program dan kegiatan :

1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

Kegiatan :

- **Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah**

Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur

- Belanja Pemasangan CCTV di 8 Titik

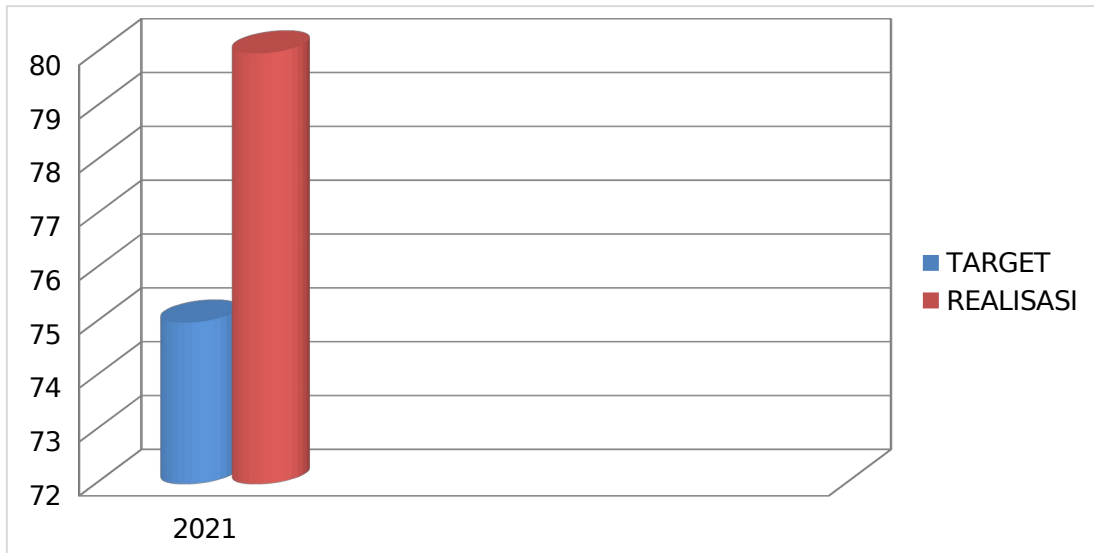
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Teknologi Informasi

- Pemeliharaan Jaringan Internet
- Pemeliharaan Perbaikan Menara Hotspot dan perlengkapannya

TUJUAN	Meningkatkan Penerapan E-Government
SASARAN STRATEGIS	<i>Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara Online.</i>

No	Indikator	2022			Kode
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan	75%	80%	106%	Sangat tinggi

Grafik



Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis ketiga yaitu **“Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara Online”** capaiannya 106 % .

Perolehan capaian persentase didapat dengan memakai definisi operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan	
Jumlah Pengunjung Bulan n	X 100%
Jumlah Pengunjung Bulan n-1	

- ❖ Jumlah bulan ini dikurang jlh bulan lalu dibagi bulan ini ditambah bulan lalu dikali 100 %

Sehingga realisasi yang didapat sebesar 80 % berdasarkan target kinerja tahun 2022 sebesar 75 % didapat persentase capaian kinerja sebesar 106%

Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja peningkatan jumlah pengunjung

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara Online	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan	1.000 pengunjung website	1.060 pengunjung website	106

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran ketiga sebagai berikut :

❖ **Faktor Keberhasilan**

❖ **Presentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan.**

- Peningkatan jumlah pengunjung perbulan pada website Balangan.kab yaitu 1.060 visitor dari target 1.000 visitor,website ini berisi informasi pembangunan kabupaten balangan, kegiatan kepala daerah dan wakil, sekretaris daerah dan ibu pkk.
- Peningkatan jumlah pengunjung atau visitor pada website Informasi Publik sebesar 1.056 pengunjung dari target 1.000 pengunjung website ini berisi Daftar Informasi Publik PPID seperti informasi profil badan publik,laporan keuangan,laporan kinerja SKPD Regulasi dan kebijakan, Prosedur layanan informasi public.
- Pada Aplikasi Elapor laporan/keluhan masyarakat yang ditangani ada 10 laporan yang sudah diteruskan dan sudah ditangani oleh pihak yang berwenang dari target 10 laporan.

- di Upload nya berita informasi kabupaten balangan pada Artikel Infopublik 350 artikel dan Foto Infopublik 655 artikel yang diupload di website infopublik.id pada portal kementrian.

Ada beberapa permasalahan/hambatan yaitu :

1. Website daerah balangan sering di serang hacker atau malware
2. Kurangnya sdm yg focus mengelola hal web/ operator
3. Tampilan website kurang menarik dan tingkat keamanannya tidak memadai
4. Pelayanan informasi publik belum maksimal mencapai ke pemerintahan desa
5. Kurangnya peran aktif dalam penyampaian informasi publik dari PPID Pembantu di skpd ke website PPID Balangan
6. Kurangnya pemahaman ppid pembantu terhadap pengelolaan informasi public
7. sarana dan prasarana penunjang informasi layanan belum tersedia baik dari ppid utama maupun ppid pembantu skpd.
8. Belum adanya petugas layanan informasi
9. Kurangnya SDM terampil untuk bidang jurnalistik
10. Belum Optimalnya dukungan Implementasi pelayanan informasi Publik di SKPD
11. Minimnya jumlah informasi Publik yang diumumkan oleh PPID SKPD
12. Belum terealisasinya penerapan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan desa.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Perlunya membentuk tim keamanan informasi
2. Penambahan sdm
3. Website perlu dilakukan upgrade
4. Sosialisasi dan pembinaan kedesa
5. Monitoring dan evaluasi dari PPID utama dan pemberian reward kepada PPID Pembantu skpd
6. Pembinaan terhadap ppid pembantu skpd dalam meningkatkan pelayanan informasi public
7. Diadakannya sarana dan prasarana yg mendukung sesuai standar.

8. Penambahan tenaga editor berita pembangunan Kabupaten Balangan
9. Memberikan pemahaman guna menyamakan persepsi betapa penting dan perlunya dukungan bagi Kepala SKPD dalam implementasi pelayanan informasi publik sesuai yang diamanatkan UU KIP no 14/tahun 2018
10. Peningkatan kapasitas PPID pembantu/ SKPD dan Admin PPID SKPD
11. Meningkatkan Pemahaman dan Komitmen kepala desa dalam implementasi keterbukaan informasi publik lingkup pemdes di kab. Balangan.

Sasaran Ketiga “**Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara Online**” didukung program dan kegiatan :

1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
Kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.010.591.798 Atau 94,64% dari pagu sebesar Rp. 19.030.844.284 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatkan persentase desa yang terlayani TIK sebesar Rp. 5.529.684.147

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Penerapan E-Government pada instansi Pemerintah	302.754.038	207.468.224	68,53%
Meningkatnya Cakupan desa yang terlayani TIK	3.500.800.00 0	3.249.918.453	84,89%
Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara online	3.289.070.53 6	3.132.798.000	95,25%

D. Analisis Efisiensi.

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Penerapan E-Government pada instansi	225 %	68,53%	207.468.224	Sangat Efisien

	Pemerintah				
2.	Meningkatnya persentase desa yang terlayani TIK	840 %	84,89%	3.249.918.45 3	Sangat Efisien
3.	Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara online	106 %	95,25%	3.132.798.00 0	Efisien

Penjelasan dari table diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penerapan E-Government pada instansi pemerintah dikategorikan Sangat Efisien karena antara capaian kinerja dan capaian keuangan lebih besar capaian kinerja. Dalam artian dengan anggaran yang minimal tetap bisa mendapatkan capaian kinerja yang maksimal.
2. Meningkatnya persentase desa yang terlayani TIK juga termasuk kategori Sangat Efisien karena capaian kinerja sebesar 840% lebih besar dibandingkan capaian keuangan 84%.
3. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya layanan data dan informasi pemerintahan secara online pun juga dikategorikan Sangat Efisien karena persentase capaian kinerjanya sebesar 106 % dan capaian keuangan yaitu sebesar 95,25%.

3.2 AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	91% sampai dengan 100%	Berhasil
III	81% sampai dengan 90%	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81%	Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Indikator	2022			PREDIKAT
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	56.67 %	56.67%	100%	Sangat Berhasil
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	18%	100%	Sangat Berhasil
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	80%	80%	100%	Berhasil
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	45%	45%	100%	Berhasil

pembangunan daerah				
Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	Berhasil

B. ANALISIS KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sangat berhasil dilaksanakan. Dari 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 100\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Visi, Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan untuk masa tahun 2016-2021, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN	<i>Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa</i>
----------------	--

INDIKATOR	2022			Kode
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung	56.67 %	56.67%	100 %	Sangat Tinggi

dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	18%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis pertama yaitu “ Meningkatkan jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa” capaiannya sebesar 100%. Capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama ini didukung dengan adanya kinerja dari Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Informatika dimana yang bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU Esselon 3 ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Informatika. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosan

Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfosan dihitung dari Jumlah OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun perhitungannya adalah dari 30 OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan baru 30 SKPD yang terhubung dengan jaringan koneksi internet yang di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

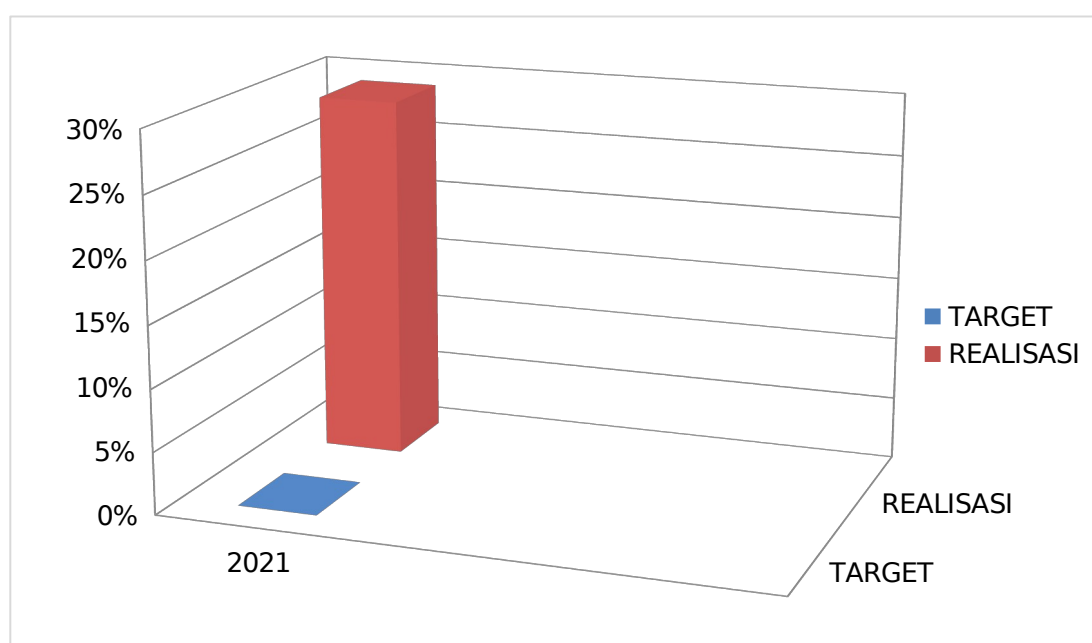
Namun dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

Rumus Perhitungannya:

Formula Perhitungan	
Jumlah OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan Diskominfo	X 100%
Jumlah Seluruh OPD	

Sehingga didapat: $(12/30) \times 100\% = 40\%$

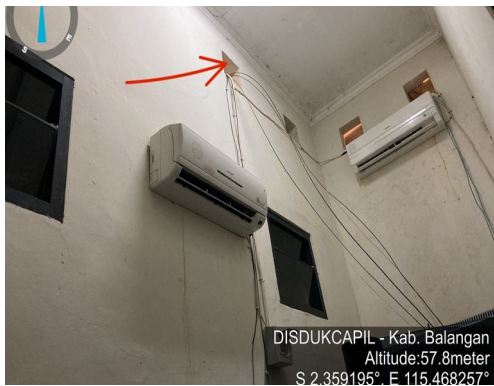
Grafik



Namun dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan

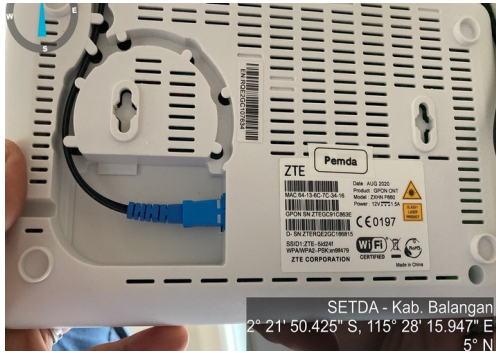
FOTO-FOTO KEGIATAN

1. Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan



2. Sekretariat Daerah





SETDA - Kab. Balangan
 2° 21' 50.425" S, 115° 28' 15.947" E
 5° N

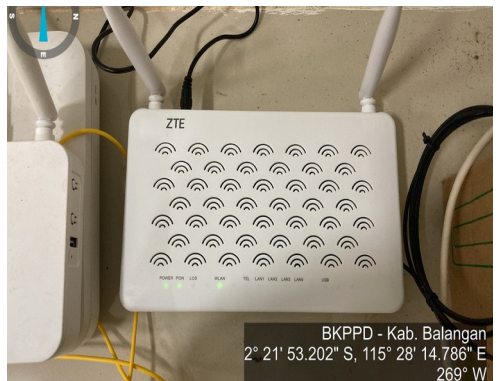


SETDA - Kab. Balangan
 2° 21' 50.359" S, 115° 28' 15.683" E
 217° SE

3. BKPPSDM



BKPPD - Kab. Balangan
 2° 21' 54.100" S, 115° 28' 14.674" E
 73° E



BKPPD - Kab. Balangan
 2° 21' 53.202" S, 115° 28' 14.786" E
 269° W



BKPPD - Kab. Balangan
 2° 21' 53.273" S, 115° 28' 15.120" E
 321° NW



BKPPD - Kab. Balangan
 2° 21' 53.176" S, 115° 28' 15.361" E
 301° NW

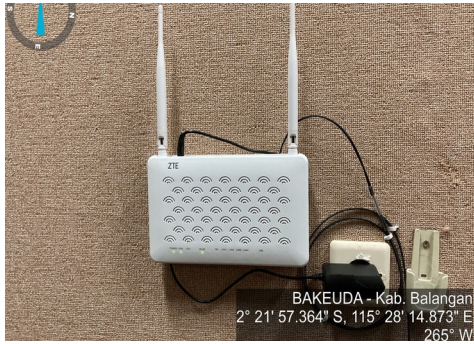
4. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



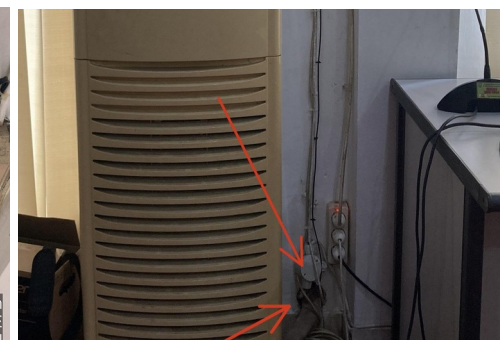
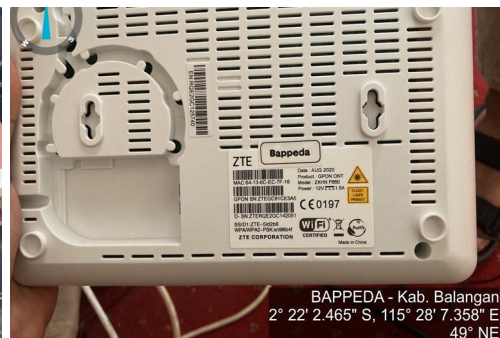
BAKEUDA - Kab. Balangan
 Altitude: 41.5 meter
 Speed: 0.7 km/h
 S 2.365922°, E 115.470525°



BAKEUDA - Kab. Balangan
 2° 21' 57.393" S, 115° 28' 14.337" E
 195° S



5. Bappedalitbang



Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

- ❖ kenaikan capaian kinerja sebesar 40% hal ini disebabkan oleh usaha yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagai Eselon III dan Kasi Pengelolaan Infrastruktur

dan Sumber Daya dalam membangun dan merealisasikan jaringan koneksi internet antar OPD supaya dapat terkoneksi dengan internet di Dinas Kominfosan sebagai leading sector Pengelolaan Teknologi dan Informasi. Dari 30 OPD yang memiliki jaringan internet online, ada 30 OPD yang terhubung dan disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Permasalahan/hambatan:

1. Belum diterapkannya secara maksimal Perda E-Government
2. Belum maksimalnya integrasi Data Penerapan E-Government di SKPD
3. Kurangnya SDM E-Government yang berbasis TIK, terutama Programmer dan Admin
4. Kurangnya Program dan Aplikasi Penunjang E-Government
5. Belum tersedianya anggaran yang memadai.

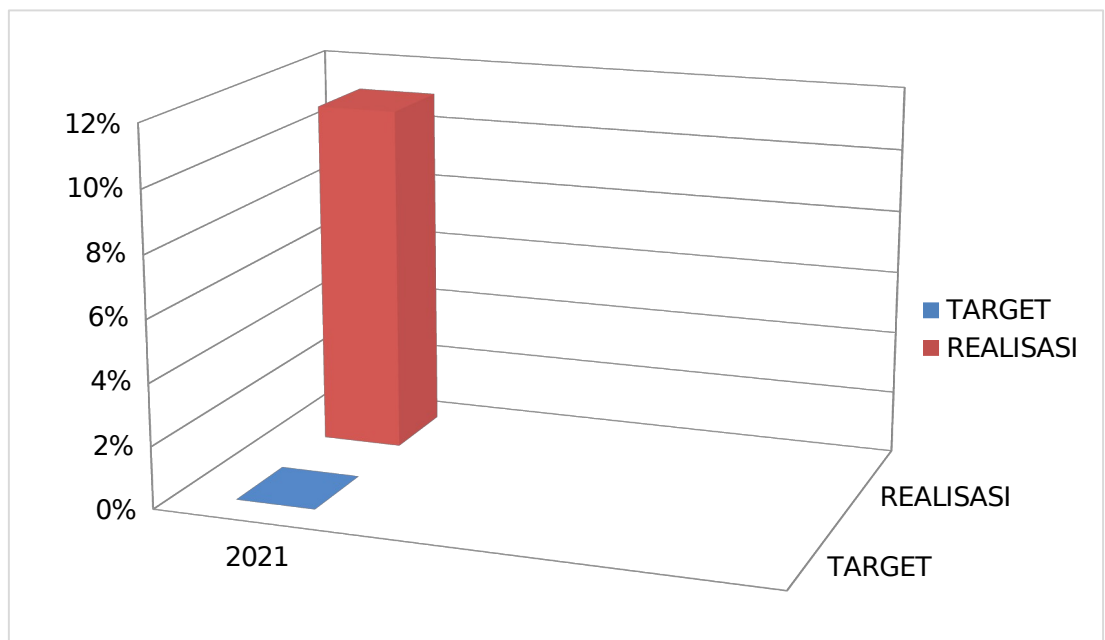
Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Mendorong aktif Perda E-Government segera diterapkan.
2. Implementasi SOP Pembuatan Aplikasi Database, SOP Sub Domain OPD dan Perbup Website.
3. Mengintegrasikan Data TIK semua OPD di Kabupaten Balangan
4. Pembuatan Program Aplikasi E-Government baik secara mandiri, dan Kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga lainnya dalam hal penerapan E-Gov
5. Menginventarisasi kembali dan update data TIK SKPD Kab. Balangan
6. Membuat perencanaan layanan e-government
7. Membuat Regulasi dan Aplikasi dalam bentuk e-gov dan e-public service.
8. Merekrut ASN yang berkapasitas dalam Bidang TIK baik melalui CPNS maupun mutasi dari OPD lain yang memiliki ASN dengan kriteria tersebut.

2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dihitung dari Jumlah OPD yang memiliki aplikasi pengembangan mandiri (bukan aplikasi pusat), online dan terintegrasi . Adapun perhitungannya adalah jumlah aplikasi yang dimiliki OPD yang online dan terintegrasi disbanding dengan Jumlah seluruh Aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Balangan.

Grafik



Namun dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

Rumus Perhitungannya:

Formula Perhitungan	
Jumlah Aplikasi OPD yang online dan terintegrasi	
Jumlah Seluruh Aplikasi OPD di Pemkab Balangan	X 100%

Sehingga di dapat: $(2/18) \times 100\% = 11,11\%$

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

- ❖ kenaikan capaian kinerja sebesar 11,11% hal ini disebabkan oleh usaha yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagai Eselon III dan Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data sebagai Eselon IV dalam merealisasikan integrasi aplikasi antar OPD supaya dapat lebih termanfaatkan untuk Publik dan memudahkan seluruh layanan. Dari 18 Aplikasi yang dimiliki OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan ada 2 Aplikasi pengembangan mandiri, online dan terintegrasi. Yaitu Aplikasi Kependudukan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dan Aplikasi E-Presensi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Permasalahan/hambatan:

1. Belum diterapkannya secara maksimal Perda E-Government
2. Belum maksimalnya integrasi Data Penerapan E-Government di SKPD
3. Kurangnya SDM E-Government yang berbasis TIK, terutama Programmer dan Admin
4. Kurangnya Program dan Aplikasi Penunjang E-Government
5. Belum tersedianya anggaran yang memadai.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Mendorong aktif Perda E-Government segera diterapkan.
2. Implementasi SOP Pembuatan Aplikasi Database, SOP Sub Domain OPD dan Perbup Website.
3. Mengintegrasikan Data TIK semua OPD di Kabupaten Balangan
4. Pembuatan Program Aplikasi E-Government baik secara mandiri, dan Kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga lainnya dalam hal penerapan E-Gov

5. Menginventarisasi kembali dan update data TIK SKPD Kab. Balangan
6. Membuat perencanaan layanan e-government
7. Membuat Regulasi dan Aplikasi dalam bentuk e-gov dan e-public service.
8. Merekrut ASN yang berkapasitas dalam Bidang TIK baik melalui CPNS maupun mutasi dari OPD lain yang memiliki ASN dengan kriteria tersebut.

Sasaran pertama ***“Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa”*** didukung program dan kegiatan :

1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pedmerintah Kabupaten Balangan

Sub Kegiatan:

- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan

Sub Kegiatan:

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

SASARAN	<i>Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa</i>		
----------------	--	--	--

INDIKATOR	2022			Kode
	Target	Realisasi	Capaian	
		i		

Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	80%	80%	100 %	Sangat Tinggi
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	45%	45%	100%	Sangat Tinggi
Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :

3. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah

Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah dihitung dari survey kepuasan masyarakat. Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah jawaban “PUAS” dibagi seluruh jumlah responden dikalikan 100%.

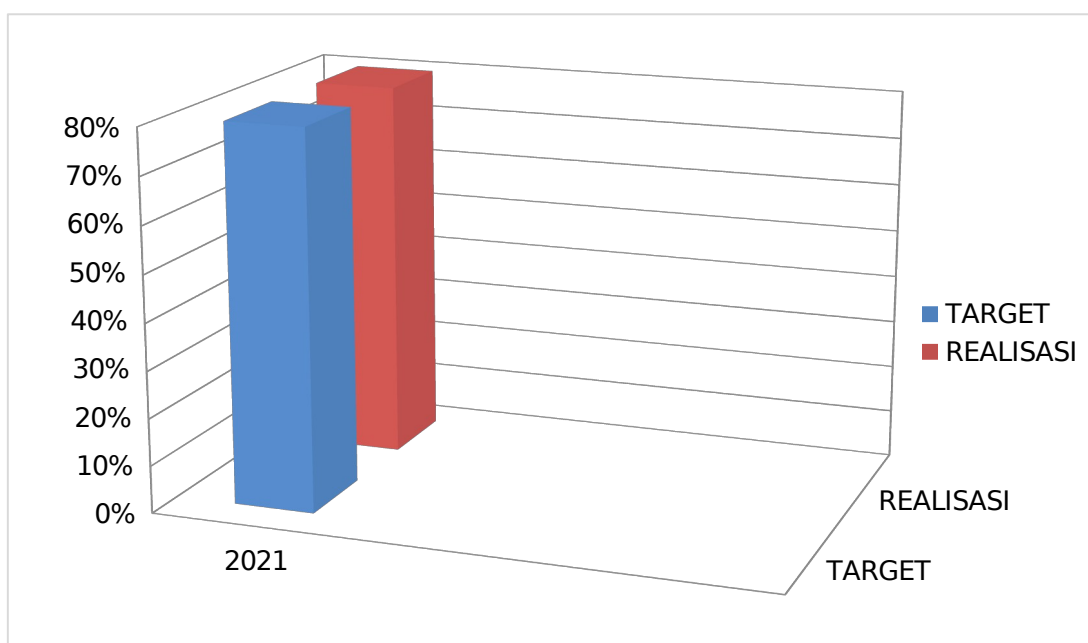
Dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

Rumus Perhitungannya:

Formula Perhitungan	
Jumlah Jawaban "PUAS"	X 100%
Jumlah Seluruh Responden	

Sehingga didapat: $(400/500) \times 100\% = 80\%$

Grafik



Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

- ❖ Capaian sebesar 100% disebabkan oleh usaha yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik sebagai Eselon III dan Kasi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik, Kasi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi serta Kasi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan sebagai Eselon IV dalam mengawal kegiatan dalam Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik. Khususnya dalam hal pengelolaan konten di media sosial Batarbangan, FB, Youtube maupun Instagram. Tidak kalah pentingnya juga

keberhasilan dalam pengelolaan Web Site Balangan Kab. Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan pun memiliki andil besar dalam keberhasilan pencapaian indikator ini. Terutama dalam hal pengelolaan Kerjasama media yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar. Dan yang lebih membanggakan adalah keberhasilan Tim Media Center Kabupaten Balangan yang mendapatkan penghargaan dari Kementrian Kominfo sebagai Media Center Teraktif Berkontribusi Kategori Berita (Kabupaten/Kota) Peringkat X.

FOTO PENGHARGAAN



Permasalahan/hambatan:

1. Belum adanya Perbup yang mengatur tentang Kerjasama Media.
2. Banyak akun-akun palsu dimedia social yang memprovokasi masyarakat
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diterima, tanpa menerapkan sisten *Saring - Saring - Sharing*.
4. Kurangnya komitmen dari seluruh SKPD dalam memanfaatkan media social yang dikelola Dinas Kominfosan

5. Kurangnya SDM dalam bidang editing berita, gambar maupun video yang dimiliki Dinas Kominfo

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Menyusun Perbup yang mengatur Kerjasama Media.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal penggunaan media social yang baik.
3. Menugaskan salah satu karyawan untuk memblokir akun-akun provokator di media sosial
4. Sosialisasi kepada seluruh SKPD untuk dapat memanfaatkan media social resmi Kabupaten Balangan dalam menyampaikan informasi kepada publik
5. Merekrut tenaga editing untuk bisa mengedit berita, foto maupun video pembangunan Pemkab Balangan

Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

4. **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dihitung dari Jumlah OPD yang menggunakan Data Statistik dari Diskominfo dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%.

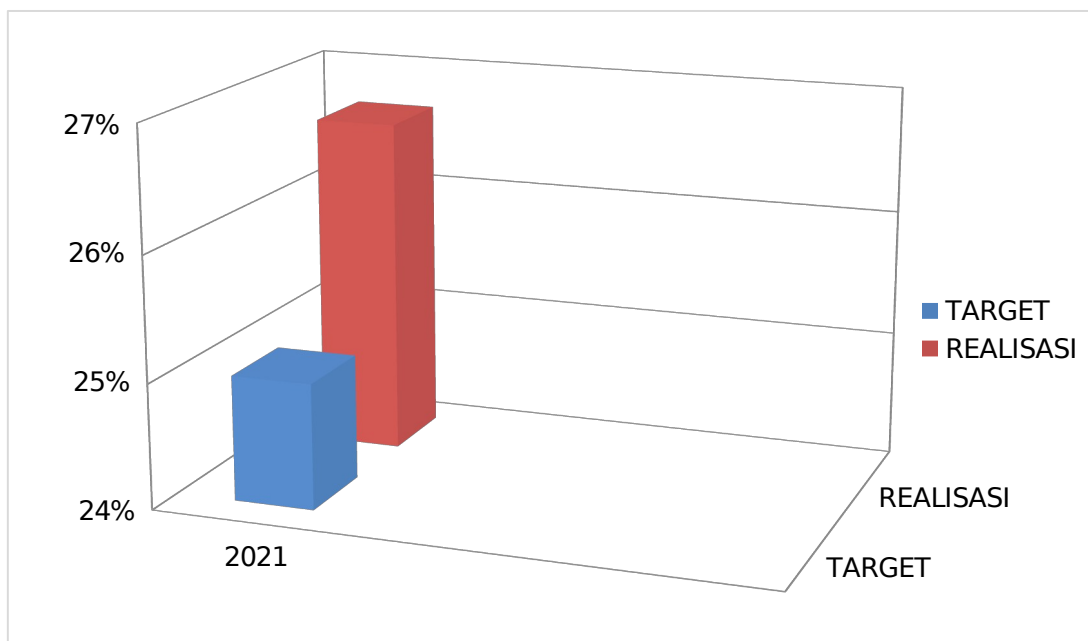
Dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

Rumus Perhitungannya:

Formula Perhitungan	
Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan	X 100%
Jumlah Seluruh OPD	

Sehingga didapat: $(8/30) \times 100\% = 26,67\%$

Grafik



Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

- ❖ Capaian sebesar 107% disebabkan oleh usaha yang dilakukan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai Eselon III dan Kasi Pengumpulan Data Statistik, Kasi Pengolahan Data Statistik sebagai Eselon IV dalam mewujudkan data statistic sektoral yang bisa dimanfaatkan oleh OPD dalam Menyusun perencanaan pembangunan. Strategi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik tentang data sektoral yang diperlukan dan perlu dilakukan survey. Berikutnya melakukan survey kepada masyarakat dengan melibatkan tenaga Surveyor yang di rekrut dari anggota masyarakat. Data yang diperoleh dari survey kemudian diolah Bersama dengan Tim dari BPS Kab. Balangan untuk akhirnya data tersebut bisa dipublikasikan dalam bentuk Buku Statistik Kabupaten Balangan.

Permasalahan/hambatan:

1. Belum adanya tenaga surveyor dan olah data yang dimiliki Diskominfo Kab. Balangan.
2. Belum pahamnya masyarakat dalam mengisi angket survey.

3. Kesibukan masyarakat yang sebagian besar adalah pedagang dan petani karet sehingga kurang responsif dalam menjawab angket survey yang disebarakan.
4. Kurang termanfaatkannya data statistik oleh SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Mengalokasikan anggaran untuk biaya tenaga surveyor.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan survey statistik.
3. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan survey sehingga lebih fleksibel dalam menentukan waktu survey.
4. Sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang Buku Statistik yang bisa dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

5. Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah

Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah dapat dihitung dari capaian Diskominfo dalam memulihkan kasus-kasus cyber yang menyerang web site OPD di Kabupaten Balangan. Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah kasus serangan cyber yang dapat terpulihkan dibagi Jumlah kasus serangan cyber yang menyerang web site OPD di Kabupaten Balangan dikali 100%.

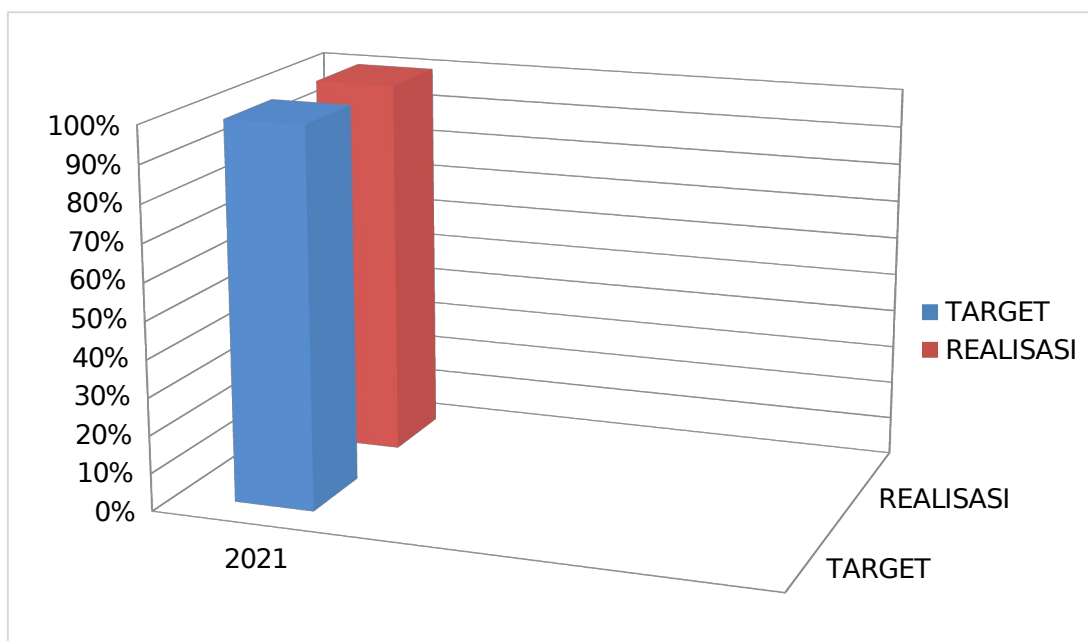
Dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

Rumus Perhitungannya:

Formula Perhitungan	
Jumlah kasus serangan cyber yang terpulihkan	X 100%
Jumlah kasus serangan cyber yang masuk	

Sehingga didapat: $(10/10) \times 100\% = 100\%$

Grafik



Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

- ❖ Capaian sebesar 100% disebabkan oleh usaha yang dilakukan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai Eselon III dan Kasi Persandian dan Keamanan Informasi sebagai Eselon IV dalam memulihkan kasus-kasus serangan cyber pada web site OPD dan Pemkab Balangan. Strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pegawai yang menangani kasus serangan cyber agar nantinya bisa mengatasi permasalahan kasus cyber seperti itu.

Permasalahan/hambatan:

1. Belum adanya tenaga khusus persandian (sandiman) yang dimiliki Dinas Kominfosan
2. Diperlukan keahlian khusus dalam menangani kasus serangan cyber.
3. Masih minimalnya anggaran untuk kegiatan persandian.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Merekrut tenaga sandiman untuk menangani kasus cyber di Kabupaten Balangan
2. Memberikan pelatihan atau diklat khusus persandian untuk pegawai di Bidang Persandian
3. Mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kegiatan persandian.

Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

C. REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2021

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.010.591.798 Atau 94.64% dari pagu sebesar Rp.19.030.844.284 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatkan persentase desa yang terlayani TIK sebesar Rp. 5.529.684.147

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	6.254.268.860	560.838.987	74.99%
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	6.254.268.860	4.968.845.160	90.24%
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	6.473.081.340	6.395.191.985	98%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	205.280.800	158.310.800	75%

perencanaan pembangunan daerah			
Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	30.800.000	29.600.000	98%

D. Analisis Efisiensi.

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	74.99%	560.838.987	Sangat Efisien
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	90.24%	4.968.845.160	Sangat Efisien
3.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	100 %	98%	6.395.191.985	Efisien

	terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah				
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	75%	158.310.800	Sangat Efisien
5.	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	98%	29.600.000	Sangat Efisien

Penjelasan dari table diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo termasuk kategori **Sangat Efisien** karena dengan penyerapan anggaran 74.99% dapat merealisasikan capaian kinerja 100%.
2. Meningkatnya Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi termasuk kategori **Sangat Efisien**

karena dengan realisasi keuangan 90.24% dapat merealisasikan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah termasuk kategori **Efisien** karena dengan realisasi keuangan sebesar 98%, capaian realisasi kinerjanya sebesar 100%.
4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah termasuk kategori **Sangat Efisien** karena dengan realisasi keuangan sebesar 75% dapat merealisasikan kinerja sebesar 100%.
5. Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah juga termasuk kategori Sangat Efisien karena dengan realisasi keuangan sebesar 98% dapat merealisasikan kinerja sebesar 100%.

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026 juga Rencana Strategik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 188.45/ /SK/Diskominfo/Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bahwa semua indicator yaitu 5 (lima) indicator dikategorikan Sangat Berhasil.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKjIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2021,

dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai secara berkala sehingga terpelihara kompetensi pegawai untuk peningkatan kinerja .
- 2) Meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan tingkat absensi karyawan.
- 3) Motivasi pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian perlu untuk ditingkatkan lagi agar kinerja pegawai secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi.
- 4) Memberikan fasilitas kerja seperti pemasangan teknologi (IT), perangkat komputer yang memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.
- 5) Memberikan reward dan punishment terhadap karyawan. Pemberian reward dapat menjadi pemacu semangat bagi karyawan lain untuk dapat bekerja lebih baik sedangkan punishment ditujukan agar karyawan lebih berhati – hati dan disiplin dalam bekerja sehingga akan meminimalisir kesalahan yang sama akan terjadi.
- 6) Bidang Komunikasi dan Informatika akan terus berpacu dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi serta aplikasi – aplikasinya yang telah tersedia untuk mewujudkan “ Masyarakat Informasi dan Komunikatif “

Paringin, 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KAB BALANGAN


MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005